

## REPRESENTASI POLITIK PEREMPUAN DI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

## REPRESENTATION OF WOMEN'S POLITICS IN THE DEMOCRAT NATIONAL PARTY

Winda Roselina Effendi

(Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, UNRIKA, Indonesia)

winda.effendis@gmail.com

### **Abstrak**

*Perempuan dan politik adalah wacana yang menarik untuk diperbincangkan bahkan menjadi suatu yang politis untuk diperdebatkan. Hal ini disebabkan oleh fakta, ketika politik ditempatkan di wilayah publik, definisi, konsep, dan nilai-nilai yang dikandungnya selalu menempatkan perempuan secara marginal di area tersebut, salah satu posisinya yang dimarjinalkan adalah perannya di dalam institusi politik terutama dari jabatan-jabatan politik dan di dalam proses-proses pembuatan keputusan politik, termasuk dalam hal ini adalah institusi partai politik. Di Indonesia pasca reformasi dibuat kebijakan untuk mendorong penguatan peran politik perempuan dimana parpol harus memenuhi kuota 30 % keterwakilan perempuan sebagai pengurus di tingkatan pusat dan juga sebagai syarat keikutsertaan parpol dalam pengajuan calon legislatif di tiap daerah pemilihan. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebagai salah satu partai yang lolos menjadi kontestan pemilu 2014 juga diwajibkan mengimplementasikan kebijakan tersebut. Namun, ada pandangan sinis yang mengatakan partai-partai politik hanya menjalankannya sebagai pemenuhan syarat administratif. Maka dalam konteks ini menarik untuk melihat upaya partai Nasdem dalam mendorong penguatan peran politik perempuan di dalam institusinya.*

**Kata Kunci:** Partai Politik, Feminisme, Representasi Politik Perempuan

### **Abstract**

*Women and politics are interesting discourses for discussion and even become a political one for debate. This is due to the fact, when politics is placed in the public domain, the definitions, concepts, and values it contains always place women in a marginal way in that area, one of the marginal positions is their role in political institutions, especially from political positions and in the processes of making political decisions, including in this case are political party institutions. In post-reform Indonesia, a policy was made to encourage the strengthening of women's political roles, where political parties had to fulfill a 30% quota for women's representation as central officials and also as a condition for political parties' participation in nominating legislative candidates in each electoral district. The National Democratic Party (Nasdem) as one of the parties that qualified for the 2014 election contestants was also required to implement the policy. However, there is a cynical view that says political parties only carry it out as meeting administrative requirements. So in this context it is interesting to see the efforts of the Nasdem party in encouraging the strengthening of women's political role in their institutions.*

**Keywords:** Political Parties, Feminism, Women's Political Representations

## PENDAHULUAN

Perempuan menghadapi tantangan besar dalam meraih jabatan politik bukan hanya karena kendala yang berasal dari dirinya sendiri, melainkan ada kendala struktural yang diciptakan oleh sistem nilai yang berkembang di masyarakat, termasuk kebijakan-kebijakan institusi politik seperti partai politik dan negara yang tidak memperhatikan kesetaraan gender. Fenomena ini memperkuat fakta bahwa sistem kekuasaan di dunia dibangun atas dasar pandangan *biner* laki-laki dan perempuan.

Salah satu contoh kasusnya kontestasi pemilihan umum pada dasarnya merupakan hak politik dari seluruh masyarakat yang merupakan warga negara Indonesia dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dimana partai politik sebagai wadah utamanya. Dalam sejarah pemilihan umum, masyarakat Indonesia masih menjadikan perempuan sebagai pilihan kedua untuk menduduki jabatan politik. Hal ini bisa dibuktikan dari data yang ada dalam sejarah politik Indonesia sejak pemilihan pertama tahun 1955. Pada pemilihan umum pertama tahun 1955 hanya ada 3,8 % perempuan di parlemen Indonesia dan tahun 1960-an ada 6,3 %. Angka tertinggi ada pada periode 1987-1992 yaitu 13 %. Tetapi turun lagi menjadi 12,5 % tahun 1992-1997, 10,8 % menjelang Soeharto jatuh, dan hanya 9 % pada periode 1999-2004. Sedangkan pada tahun 2004-2009, hanya ada 11,4 % atau sekitar 63 perempuan saja yang menjadi anggota parlemen (DPR) periode 2004-2009. Dan terakhir pada periode 2009-2014 terdapat 104 anggota DPR perempuan dari total 560 anggota DPR (18,6%).

Namun dalam perkembangannya yang paling aktual, Undang – Undang berkenaan tentang Pemilu yakni UU No.8 Tahun 2012 pasal 8 akhirnya telah menetapkan peraturan 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif dari tiap partai politik. Hal ini pula diperkuat dengan Peraturan KPU No.7 Tahun 2013 yang isinya menyebutkan “Jika ketentuan 30% keterwakilan perempuan tidak terpenuhi, maka partai politik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat pengajuan daftar calon pada daerah pemilihan yang bersangkutan”.

Keputusan bernuansa keberpihakan terhadap perempuan (*Affirmative Action*) ini menunjukkan dalam perkembangan demokrasi, partisipasi serta responsifitas gender dianggap sebagai variabel penting dalam kehidupan bernegara. Politik tidak boleh dianggap sebagai suatu instrumen yang didominasi hanya oleh kaum laki-laki.

Ini yang kemudian menjadi dasar dari kompetisi politik yang demokratis dan partisipatif. Quota 30 % diharapkan menjadi upaya konstruktif yang mengandung rekayasa untuk mematahkan tradisi patriarki yang lebih memberikan kesempatan kepada laki-laki daripada perempuan, termasuk dalam memberikan peluang memperoleh jabatan-jabatan politik. Tradisi dan sistem patriarki telah lama dinilai sebagai sistem yang menghambat perempuan dalam memasuki ranah politik. Kondisi ini yang menyebabkan tidak mudah bagi perempuan untuk memperoleh tempat di dunia politik. Hal ini juga diungkapkan oleh Trafton yang menyatakan bahwa “*The effort to take our place in the political system will not be an easy one*”.

Dalam posisi ini, partai-partai politik di Indonesia didorong untuk memberikan wadah yang lebih representatif bagi peran politik perempuan didalam institusinya. Sebab, partai politik merupakan satu-satunya wadah organisasi politik yang berhak ikut pemilu untuk mengisi jabatan-jabatan politik pada lembaga-lembaga negara. Maka sudah seharusnya partai politik juga bersikap demokratis, menempatkan kandidat-kandidat yang mengisi jabatan politik berdasarkan pada kapasitas kandidat tersebut tanpa memandang bias gender. Dan, terkait dengan partai politik dan pemilu, di Indonesia tidak lama lagi akan digelar pemilu 2014 yang akan diikuti oleh 12 partai politik diantaranya Partai Nasdem, PKB, PKS, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, Partai Hanura, PBB, dan PKPI. Namun yang menarik disini adalah bahwa Partai Nasdem merupakan satu-satunya partai politik baru yang berhasil lolos verifikasi faktual untuk ikut dalam kontestasi pemilu 2014.

Sebagai partai baru, partai Nasdem mengklaim mengusung visi misi yang juga baru dan berbeda dengan partai-partai politik lama dengan tema “Menggalang Gerakan Restorasi Indonesia”. Dijelaskan dalam manifestonya, Partai Nasdem menyadari kondisi demokrasi saat ini; yang hampa, yang artifisial, yang keablasan, dan sebagainya. Kehadiran Partai Nasdem adalah untuk mengisi kehampaan itu, untuk menambal yang artifisial itu, dan mengerem yang tengah keablasan ini. Salah satu tantangan bagi partai Nasdem adalah memperkuat peran perempuan terutama dalam representasi politiknya. Partai Nasdem memahami pentingnya keterlibatan perempuan dalam perjuangan politik. Fokus Nasdem yakni memfasilitasi edukasi politik bagi kaum perempuan agar memiliki peran yang lebih besar. Oleh Ferry Mursidan Baldan hal ini dipertegas bahwa perjuangan politik perempuan perlu diwujudkan dengan

aktualisasi politik, yakni mendorong perempuan Indonesia di parlemen menghasilkan produk-produk politik yang tepat untuk rakyat.

Dalam konteks ini, maka yang akan menjadi kajian dalam artikel ini yakni bagaimana upaya dari Partai Nasdem untuk memperkuat peran perempuan dalam politik? Dan sejauh mana hal itu diwujudkan dalam representasi politik perempuan di partai Nasdem?

## **PEMBAHASAN**

### **Partai Politik dan Feminisme**

Alan Ware mendefinisikan partai politik ke dalam tiga kategori. *Pertama*, partai politik sebagai institusi yang membawa rakyat secara bersama-sama dalam mencapai kekuasaan di dalam negara. *Kedua*, partai politik sebagai lembaga yang mencari perwakilan kepentingan di dalam sebuah masyarakat. *Ketiga*, partai politik adalah sekelompok orang atau masyarakat yang mempunyai kesamaan ideologi, nilai dan perilaku.

Pada kategori yang ketiga, Alan Ware menetapkan beberapa hal antara lain : a) Cara yang paling efektif agar sebuah ideologi diterima adalah dengan menetapkan sebuah forum dimana siapa saja yang tertarik kepada ideologi tersebut bisa berinteraksi dengan yang lain; b) Pada beberapa partai pada bagian tertentu dari ideal politik mereka disusun oleh para pendiri termasuk keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik; c) Bagaimanapun partai memiliki sebuah ideologi, dan bagaimanapun ini adalah aspek utama dari alasan keberadaan (*raison d'être*) sebuah partai, banyak tugas yang harus dilaksanakan; d) Memiliki pendukung dan pengurus bisa saja menolong legitimasi partai itu sendiri – dan bukan saja ideologinya dalam masyarakat yang lebih luas; e) Mereka yang menduduki ‘ruangan-ruangan’ bisa mempunyai tambahan rangsangan untuk membentuk sebuah grup pendukung; f) Sebagai tambahan kepada kemampuan mereka dalam melakukan tugas, pendukung kemungkinan mampu menciptakan sumberdaya lain untuk partai-contohnya seperti uang.

Kemudian, dalam menyoroiti peran perempuan dalam politik, maka tidak terlepas dari pendekatan yang lazim digunakan dalam konteks ini adalah mengenai feminisme. Pendekatan feminisme yang didasarkan pada suatu kerangka teori feminis, mengusulkan bahwa dalam kegiatan penelitian perempuan perlu diterima dan dihargai

sebagai sesama manusia yang mempunyai potensi (kemampuan) untuk berkembang. Karakteristik perempuan yang tidak kompeten, lemah, tidak mandiri lebih merupakan produk budaya yang meremehkan, dan oleh karenanya perlu diimbangi dengan gambaran tentang perempuan yang pintar, mandiri, cerdas, berani, mampu mengambil keputusan, sukses, etis, dan lain-lain. Kaum perempuan juga mempunyai kemampuan untuk mengembangkan kondisi lingkungan hidupnya dan sangat bisa ikut memberi arah kepada pengembangan masyarakat, ekonomi, politik, dan pribadi. Kaum perempuan memiliki berbagai macam kualitas manusia yang bisa meningkatkan mutu hidupnya, seperti yang dimiliki kaum laki-laki.

Menurut Wardhani, teori Feminisme memandang politik melalui 3 cara. Pertama, secara konseptual teori feminisme memberi arti kepada *global politics*. Hal ini dimaksudkan bahwa, feminisme memberikan warna baru bagi dunia politik global. Bahwa isu gender, feminitas dan maskulinitas memberikan pengaruh cukup krusial dalam dunia internasional, khususnya pada bidang politik. Perempuan mulai diperhitungkan perannya, dan tak lagi dipandang sebelah mata. Kedua, teori feminisme memandang politik secara empiris, yaitu bahwa pendekatan feminis dipandang perlu melihat realitasnya. Hal ini dimaksudkan bahwa teori feminisme perlu mengembangkan dirinya sedemikian rupa, agar dalam penerapannya teori feminisme dapat menganalisis fenomena-fenomena nyata yang terjadi terkait gender khususnya, dan dapat memprediksikan hasilnya. Ketiga, teori feminisme memandang bahwa dirinya perlu meningkatkan perubahan yang positif khususnya dalam aspek politik.

### **Perempuan di Parlemen dan Partai Politik**

Mempromosikan dan memperjuangkan kesetaraan dalam arena politik dan legislasi dalam masyarakat dan kehidupan bernegara dalam pengamatan para kaum feminis tidaklah mudah. Dalam buku terbaru yang diedit oleh Sasha Roseneil *Beyond Citizenship? Feminism and the Transformation of Belonging* yang dipublikasi oleh Palgrave MacMillan pada 2013 diungkapkan berbagai penelitian bagaimana strategi kenegaraan banyak menemui kegagalan karena dia dibangun dari asumsi-asumsi patriarki. Teori dasar kewarganegaraan (*citizenship*) masih dan terus berbasis patriarki. Kajian feminisme masih banyak yang ragu-ragu untuk terlibat dalam konsep kewarganegaraan yang berbasis patriarki tersebut. Kelemahan mendasar adalah bagaimana perempuan paling miskin tidak memiliki kesadaran kewarganegaraan

karena negara sama sekali tidak menguntungkan bagi mereka, alih-alih memberikan kebutuhan dasar (*provision*) sebagai warga negara. Maka perempuan dalam ceruk ini pun juga tidak mengenal hak (*right*) dan partisipasi (*participation*) sebagai warga-negara karena kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi oleh negara. Dalam kajian feminisme kewarganegaraan yang setara adalah kewarganegaraan yang berdasarkan pada perbedaan pengalaman antara perempuan, laki-laki, dan minoritas seksual—dan negara dalam hal ini membangun strategi politiknya berdasarkan perbedaan tersebut. Selama ini yang berlaku di banyak negara adalah bahwa semua warga negara adalah sama. Asumsi sama ini dicurigai sebagai berjenis kelamin laki-laki. Maka jamak apabila perempuan dan minoritas seksual tak sungguh-sungguh merasa memiliki negara atau dipenuhi kewarganegaraannya oleh negara.

Masuknya perempuan dalam parlemen diharapkan dapat menjadi kekuatan penekan sekaligus eksekutor dalam isu-isu publik khususnya yang menyangkut hajat hidup perempuan. Partisipasi perempuan di parlemen juga membersitkan secercah harapan, dimana perempuan dapat mengeliminasi kebijakan publik yang selama ini bercorak maskulin.

Dalam setiap negara demokrasi, peranan partai politik menempati posisi sentral sebagai salah satu pilar tegaknya demokrasi. Di Indonesia pasca tumbangannya rezim orde baru, partai politik kembali memainkan peranan penting dalam menentukan arah pengambilan keputusan dari suatu kebijakan pemerintahan. Hal ini pula yang tidak luput dari paradigma feminis bahwa partai politik merupakan salah satu sarana paling efektif untuk memperjuangkan kepentingan dan isu perempuan.

Namun, rata-rata perempuan menempati kursi parlemen di seluruh dunia masih sangat rendah, yaitu 20.9 persen. Termasuk di Indonesia memberikan kontribusi negative terhadap rendahnya angka keterwakilan perempuan di dunia. Padahal menurut pasal 55 dalam Undang-Undang Pemilu No 8/2012 diwajibkan paling tidak ada tiga kandidat perempuan dalam daftar yang dipilih partai politik. Partai politik akan dilarang mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) apabila tidak memenuhi kuota ini. Dari kesemua 12 partai yang berkompetisi tingkat nasional paling tidak ada 6.576 kandidat yang menyerahkan daftar calon nama yang diverifikasi dan dari semuanya itu ada 2.434 perempuan (Carnegie Institute, 2013). Pada tingkat nasional, partai politik dapat memenuhi kuota, tetapi tidak pada level daerah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Pembina Pemilu memberikan perhatian serius pada masalah ini dan

mewajibkan seluruh partai politik untuk dapat memenuhi kuota ini, baik level nasional maupun daerah. Setelah Pemilu 2009 kuota perempuan yang menduduki kursi parlemen belum mencapai 30 persen tetapi hanya 18.2 persen. Tetapi ini mengalami kenaikan dibanding Pemilu sebelumnya, yaitu 11 persen dalam Pemilu 2014.

### **Partai Nasdem dan Penguatan Peran Politik Perempuan**

Nasional Demokrat awalnya ialah sebuah organisasi masyarakat (ormas) yang dideklarasikan pada 1 Februari 2010 oleh 45 deklarator tokoh nasional di Istora Senayan Jakarta yang dicetuskan oleh Surya Paloh dan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Pencetusan pendirian ormas ini adalah akibat rasa kegelisahan terhadap keadaan bangsa yang dirasa semakin merosot. Berdirinya ormas Nasional Demokrat ini diawali dari persaingan yang terjadi untuk memperebutkan posisi sebagai ketua umum pada Musyawarah Nasional VIII Partai Golkar pada November 2009 di Pekanbaru, Riau. Surya Paloh pada saat itu mengalami kekalahan dalam melawan Aburizal Bakrie yang meraih 297 suara. Sedangkan Surya mendapat 239 suara. Surya yang tidak memiliki jabatan politis apapun, pada 1 Februari 2010 mendeklarasikan sebuah ormas yaitu Nasional Demokrat.

Adapun visi dan misi utama dari ormas ini, yaitu untuk menggalang gerakan perubahan melalui gagasan Restorasi Indonesia. Yang dimaksud dengan restorasi Indonesia disini adalah sebuah gerakan untuk mengembalikan Pancasila sebagai jati diri negara bangsa sebagai dasar kehidupan bersama. Dengan cita-cita ini Nasional Demokrat melebarkan sayapnya di seluruh bidang kegiatan sosial di Indonesia.

Akhirnya Nasdem bermetamorfosis menjadi sebuah partai politik di Indonesia yang berasaskan Pancasila yang didirikan pada 1 Februari 2011 di Jakarta dan secara resmi dideklarasikan pada 26 Juli 2011 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Melalui sebuah rapat koordinasi nasional (rakornas), partai ini berdiri sebagai salah satu partai baru di Indonesia dengan mengusung jargon menggalang Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia. Restorasi adalah sebuah model gerakan dalam perubahan sosial yang bertujuan untuk mencapai perubahan mendasar terhadap tatanan suatu masyarakat atau bangsa dan dilakukan dengan menggunakan aturan-aturan hukum yang berlaku dan dilakukan atas kesadaran sendiri bukan atas kesadaran diluar sistem. Melalui gerakan inilah partai Nasdem bertujuan untuk mengembalikan Pancasila sebagai jati diri negara bangsa sebagai dasar kehidupan bersama. Restorasi bermula sebagai gerakan perubahan

untuk memperbaiki kondisi (Negara, bangsa, dan masyarakat) yang sedang rusak atau menyimpang dari tujuan yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Pemikiran tentang gerakan ini muncul didasari oleh kenyataan bahwa kehidupan seperti yang dicita-citakan oleh Proklamasi 1945 belum terwujud hingga saat ini seperti terjadinya konflik horizontal, ancaman disintegrasi, korupsi yang merajalela.

Restorasi berasal pada pertama, restorasi negara yang berupa upaya membangun keteladanan kepemimpinan, membangun karakter gotong royong sesuai dengan dasar negara, dan membangun kepercayaan rakyat terhadap institusi Negara. Kedua, restorasi kehidupan rakyat yang berupa upaya membangun gerakan arus bawah atas prakarsa rakyat, yang membawa nilai-nilai kebajikan, spritualitas kebangsaan, solidaritas sosial, kearifan budaya lokal, dan etos kerja yang produktif. Ketiga, restorasi kebijakan internasional yang berupa upaya membangun keseimbangan baru dalam tata dunia yang lebih adil, damai dan menjaga kelestarian alam semesta.

Terkait dengan penguatan peran perempuan, partai Nasdem memiliki dasar pemikiran bahwa perempuan dalam percaturan politik Indonesia harus tidak hanya sebagai hiasan dalam hiruk pikuk agenda kekuasaan dan kosmetik politik. Perjuangan politik perempuan Indonesia berorientasi pada pencapaian tujuan nasional guna mewujudkan cita-cita nasional. Perempuan telah mendapatkan kesempatan berada dalam wadah perjuangan politik melalui kebijakan afirmatif dan harus dapat diaktualisasikan dengan optimal. Oleh karena itu perjuangan politik perempuan Partai Nasdem melalui kiprah lembaga perwakilan rakyat (DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan kota) se Indonesia menjadi tekad Partai Nasdem untuk berwujud pada kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran bagi rakyat di seluruh Indonesia, melalui aktualisasi fungsi-fungsi politik Dewan yaitu : legislasi, anggaran, pengawasan dan keterwakilan.

Perempuan Partai Nasdem meyakini bahwa kiprah politik perempuan Partai Nasdem di lembaga perwakilan (DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota) melalui perjuangan politik dimaksud dapat memecahkan berbagai masalah sosial yang ada pada bangsa kita yaitu dengan kerja-kerja politik lembaga perwakilan secara benar dan bertanggung jawab. Untuk aktualisasi perjuangan politik perempuan dimaksud, juga sangat disadari bahwa keberadaan lembaga perwakilan (DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) haruslah merupakan lembaga yang terhormat yang patut dihormati oleh rakyat. Dan itu hanya dapat dicapai manakala

lembaga perwakilan dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat dan dapat dipercaya.

Partai Nasdem menyakini perjuangan politik perempuan Partai Nasdem membawa manfaat tidak saja bagi perempuan, tetapi juga bagi kaum laki-laki, bahkan kemanfaatan bagi negara dan bangsa Indonesia dengan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, yang didukung oleh partisipasi aktif perempuan dan laki-laki dalam perspektif pengarus-utamaan gender. Domain kerja politik legislasi, kebijakan dan program menjadi perhatian utama. Sejalan dengan itu untuk kiprah sebagai tokoh formal dan *official* wakil rakyat, maka persiapan kepemimpinan perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas dengan penguasaan *issues* kemasyarakatan dan membangun dukungan. Aktualisasi wakil rakyat dalam lembaga perwakilan merupakan jalan dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur sejahtera.

Dilatarbelakangi pemikiran dan upaya penguatan peran perempuan diatas maka partai Nasdem menegaskan bahwa kebijakan afirmatif 30 % kuota perempuan caleg, bukanlah sekedar prasyarat Pemilu. Partai Nasdem sudah melangkah lebih jauh dengan proyeksi bahwa 30 % minimal justru pada caleg yang akan terpilih. Partai Nasdem memproyeksikan kuota tersebut justru pada perempuan legislator. DCT perempuan Partai Nasdem tercatat sebanyak 40,1 % dan diantara DCT tersebut tercatat Caleg perempuan dengan no urut I pada sekitar 14 Dapil Nasional dan sangat banyak di no urut 2 dan 3. Perempuan pada no urut 1 tersebut yaitu di Riau, Sumsel, Lampung, DKI, Banten, Jabar, Jateng dan Jatim. Tidak hanya itu, struktur kepengurusan baik di tingkatan pusat hingga ke tingkatan daerah telah dijabat oleh lebih dari 30 % perempuan didalamnya bahkan ada yang mencapai 40 %.

## **PENUTUP**

Partai Nasdem sejalan dengan jargonnya yakni menggalang Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia telah menunjukkan upaya-upaya optimalisasi fungsi-fungsi partai politik didalam institusinya. Salah satu upaya yang menjadi *concern* menjelang pemilu 2014 adalah penguatan peran politik perempuan. Penguatan peran politik perempuan merupakan bagian dari visi politik Nasdem yang dipandang sebagai landasan perjuangan partai dalam memperjuangkan keadilan termasuk gender.

Berdasarkan pendekatan feminisme, dan seperti yang dikatakan Alan Ware terkait peran ideologi bahwa cara yang paling efektif agar sebuah ideologi diterima adalah dengan menetapkan sebuah forum dimana siapa saja yang tertarik kepada ideologi tersebut bisa berinteraksi dengan yang lain, Partai Nasdem menangkap isu keterwakilan perempuan masih menjadi hal yang sangat menarik perhatian banyak kalangan terutama perempuan yang mulai tergerak kesadaran politiknya. Partai Nasdem seolah tampil sebagai partai yang berbasiskan keadilan gender dengan beberapa tema dan program politik yang mengedepankan perjuangan anak dan perempuan terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Hal ini telah ditunjukkan oleh partai Nasdem dengan komposisi di struktur kepengurusan partai baik pusat maupun daerah serta daftar calon legislatif yang malahan mencapai 40 % keterwakilan perempuan jauh diatas partai lain yang rata-rata hanya berada di sekitar 30%. Nampaknya partai Nasdem menjadi salah satu partai politik yang menjadi pelopor bagi upaya penguatan peran politik perempuan.

## REFERENSI

- Alan Ware, *Political Parties And Party Systems*, New York, Oxford University Press, 1996.
- Ferry Mursidan Baldan, *Edukasi Perempuan Melalui Partai Politik* diakses dari <http://www.partainasdem.org/news/page/2373>.
- Hafid Cangara, *Komunikasi Politik : Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta : Rajawali Press, 2009.
- Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel : Studi Tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta : KPG, 2009.
- Nunuk A. Pratiwi, *Getar Gender: Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM*. Magelang : Yayasan Indonesiatara, 2004
- Mohammad Yusuf Prambudi dalam *Jurnal Perempuan dan Politik*. Edisi 35, Jakarta, 2011.
- Mufti Mubarak, *Dibawah Bendera Restorasi*. Surabaya: PT Java Pustaka Group, 2011.
- Sasha Roseneil, *Beyond Citizenship? Feminism and the Transformation of Belonging*. London : Palgrave Macmillan, 2013.
- Saparinah. 2002. *Studi Wanita: "Pengembangan dan Tantangannya"*. Edisi 4 tahun 2002.
- Trafton M. Barbara, *Women Winning : How To Run For Office*. Harvard : The Harvard Common Press, 1984.
- Women in National Parliaments : World Classification* diakses dari <http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm>



Wardhani Baiq, .Teori Feminisme.

*[http://karlinawk-fisip12.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-79151-](http://karlinawk-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-79151-)*

*[Teori%20Hubungan%20Internasional-](https://www.jurnalperempuan.org/politisi-perempuan-dan-strategi-politik-pasca-pemilu-2014.html)*

*Politisi Perempuan dan Strategi Politik Pasca Pemilu 2014, diakses dari situs*

*[https://www.jurnalperempuan.org/politisi-perempuan-dan-strategi-politik-pa](https://www.jurnalperempuan.org/politisi-perempuan-dan-strategi-politik-pasca-pemilu-2014.html)*

*[sca-pemilu- 2014.html](https://www.jurnalperempuan.org/politisi-perempuan-dan-strategi-politik-pasca-pemilu-2014.html)*

*Deklarasi Perjuangan Perempuan Partai Nasdem diakses dari situs <http://www>*